

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 81 TAHUN 2012 DALAM RANGKA
PENYELEGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI
PADANG LAWAS UTARA**

Skripsi

Oleh :

**Puspa Irajayanti Siregar
NPM 1603100034**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2020

BERITA ACARA PENGESAHAN




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **PUSPA JAYANTI SIREGAR**
N P M : 1603100034
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Rabu, 11 Maret 2020
W a k t u : Pukul 07.30 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **IDA MARTINELLY,SH,MM**
PENGUJI II : **SYAFRUDDIN,S.Sos,MH**
PENGUJI III : **H. MUJAHIDDIN,S.Sos,M.SP**


.....

.....

.....

PANITIA PENGUJI

Ketua


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP



Sekretaris


Drs. ZULEAHMI, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

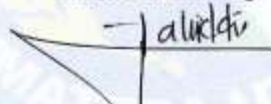
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **PUSPA JAYANTI SIREGAR**
N.P.M : 1603100034
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI PADANG LAWAS UTARA**

Medan, 18 Maret 2020

Dosen Pembimbing


MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


NALIL KHAIRANI, S.IP., M.Pd


Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP.

PERNYATAAN



Dengan ini saya, PUSPA JAYANTI SIREGAR, NPM 1603100034, Menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imblan, atau plagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplikan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis didalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima

Medan, Maret 2020

Yang Menyatakan



PUSPA JAYANTI SIREGAR

NPM.1603100034

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

OLEH :

PUSPA JAYANTI SIEGAR

1603100034

Bertambahnya penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volum, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Dengan pertumbuhan sampah yang semakin meningkat. Ada beberapa Dampak yang ditimbulkan sampah seperti menurunkan estetika lingkungan, pencemaran tanah, pencemaran air, terganggunya kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Volume peningkatan sampah biasanya dipengaruhi oleh beberapa factor seperti meningkatnya intensitas kegiatan sehari-hari kemajuan teknologi terutama dalam sistem pengemasan produk dan perubahan gaya hidup masyarakat yang cenderung memilih serba cepat dan peraktis. Sampah merupakan suatu masalah besar yang perlu mendapat penanganan yang lebih karena dampak yang ditimbulkan sangat besar sehingga pengelolaannya sangat perlu dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Padang Lawas Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

Implementasi yang dimaksud merupakan kegiatan yang dirahkan untuk merealisasikan program yang dibuat oleh lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan yang di tetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut, penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dimaksud adalah penyediaan/pembuatan TPS/TPA, sarana dan prasaran TPA/TPS, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan dan penanganan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor Nomor 81 Tahun 2012 Dalam Rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Padang Lawas Utara sudah terlaksana hal ini terlihat dari

terlaksananya program – program yang masih sedang berjalan. Meskipun dalam pelaksanaannya belum efisien. Hal ini disebabkan susahny mencari lahan untuk TPS/TPA dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemahaman peduli lingkungan.

Kata Kunci : Implementasi, Pengelolaan Sampah

KATA PENGANTAR



segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia serta petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan bagi kehidupan didunia maupun akhirat.

Skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis Membuat Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH”**.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan pihak-pihak yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini baik bantuan moril, materil, berupa petunjuk, bimbingan, nasehat, dan saran yang bermanfaat bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Yang terutama dan paling utama kepada ALLAH SWT.
2. Teristimewa kepada Ayahanda Mula Warman Siregar dan Ibunda tercinta Masni Rokiah Harahap serta kaka Nora Siska Jayanti dan adik – adik Sultan Kurnia Jaya Siragar, Jefri Darma Jaya Siregar yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat dari awal sampai akhir kepada penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP selaku Plt Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Mujahiddin, Sos, MSP selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan kesempatan kepada penulis selama menyusun skripsi.
7. Dosen–dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh pegawai dan biro yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan urusan administrasi penulis.
9. Seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Padang Lawas Utara serta narasumber yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis.
10. Sahabat saya yang tersayang Rizka Putri Daulay,S.AP, Alfin suryadi, Faisal Muhammad, Muhammad Anwar, zulfah, windi, wulan, aghnez, varadela, bibi harahap telah mensupport penulisan skripsi ini.
11. Teman – teman seperjuangan dalam melakukan penelitian nurhasana, ansor rhomadon, syahrial
12. Teman – teman seperjuangan IAN stambuk 2016 Pagi

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar–besarnya, semoga Allah SWTmelimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas segala budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, 27 Maret 2020

Puspa jayanti siregar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
4. Sistematika Penulisan.....	7

BAB II URAIAN TEORITIS

1. Pengertian Kebijakan Publik	9
2. Pengertian Implementasi	11
3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	12
4. Pengertian Sampah.....	14
5. Pengertian Pengelolaan Sampah	15

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian.....	17
2. Kerangka Konsep	18
3. Defenisi Konsep	19
4. Kategorisasi	19
5. Narasumber	20
6. Teknik Pengumpulan Data	24
7. Teknik Analisis Data.....	25
8. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
9. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyajian Data	36
-------------------------	----

2. Deskripsi Hasil Wawancara.....	36
3. Pembahasan.....	51

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	60
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sarana Pengangkutan Sampah	5
Tabel 3.4 Kategorisasi Penelitian.....	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2 Kerangka Konsep	18
Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran III	: Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran IV	: SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran V	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
Lampiran VI	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VII	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VIII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran IX	: Surat Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran X	: Surat Keterangan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengertian sampah menurut Undang –Undang nomor 18 tahun 2008 adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang padat. Sampah konsekuensi kehidupan, yang seringkali menimbulkan permasalahan. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk beserta aktivitasnya, maka timbunan sampah tentunya juga mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk berarti peningkatan jumlah atau volume timbunan sampah. Sedangkan bertambahnya jenis aktivitas berarti semakin beragam jenis sampah yang dihasilkan. Jumlah atau volume dan jenis sampah yang dibiarkan menumpuk sangat membahayakan bagi kehidupan manusia. Tumpukan sampah selain tidak sedap dipandang mata, juga membutuhkan lahan yang tidak sedikit pembuangannya serta dapat menimbulkan penyakit bagi manusia dan pencemaran lingkungan.

Ada beberapa Dampak yang ditimbulkan sampah seperti menurunkan estetika lingkungan, pencemaran tanah, pencemaran air, terganggunya kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Volume peningkatan sampah biasanya dipengaruhi oleh beberapa factor seperti meningkatnya intensitas kegiatan sehari-hari kemajuan teknologi terutama dalam sistem pengemasan produk dan perubahan gaya hidup masyarakat yang cenderung memilih serba cepat dan praktis. Sampah merupakan suatu masalah besar yang perlu mendapat penanganan yang lebih

karena dampak yang ditimbulkan sangat besar sehingga pengelolaannya sangat perlu dilakukan. Dengan demikian pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas kebersamaan, kepastian hukum, dan kewenangan pemerintah serta peran masyarakat sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Lingkungan yang sehat merupakan lingkungan yang memiliki manajemen sampah yang baik. Tidak dapat dipungkiri sampah sangat erat kaitannya dengan lingkungan. Pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya membuat lingkungan menjadi kotor, dan tidak teratur. Selain itu sampah yang dibuang tidak pada tempatnya dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Polusi akibat sampah pun tidak dapat dihindari seperti polusi udara akibat pembakaran sampah, pencemaran air tanah dan permukaan, merusak keindahan pemandangan kota, dan menimbulkan aroma/bau yang tidak enak.

Untuk itu adanya tempat pembuangan sampah (TPS) sementara yang memadai akan meminimalisir dampak-dampak lingkungan tersebut. Tempat pembuangan sampah (TPS) sementara juga sangat penting jikalau ditempatkan pada lokasi yang sesuai untuk tempat pembuangan sampah yang memenuhi persyaratan tertentu dan berwawasan lingkungan. Dalam memilih lokasi tempat penampungan sampah (TPS) sementara sebaiknya meliputi evaluasi terhadap beberapa variabel berikut: jarak terhadap jalan utama, jarak terhadap sungai, dan buffering di sekeliling tempat penampungan sampah (TPS). Adapun secara lebih spesifik syarat-syaratnya adalah: 8 - Minimal 30 meter dari sungai - Minimal

berjarak 50 meter dari permukiman, sekolah, dan taman - Minimal berjarak 160 meter dari sumur .

Berbagai upaya dilakukan untuk menangani pengelolaan sampah kabupaten padang lawas utara terutama dikecamatan padang bolak namun setiap upaya tersebut mengalami kendala, karena semakin tingginya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat kabupeten padang lawas utara kecamatan padang bolak membuat kebutuhan tempat pembuangan akhir (TPA) sangat dibutuhkan untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah. Setiap bulannya produksi sampah semakin meningkat.Karena itu TPA sangat dibutuhkan untuk pengelolaan sampah tersebut.

Untuk saat ini sampah tersebut dibuang atau dikumpulkan ketempat pembuangan sementara (TPS) dengan status sewa lahan kepada masyarakat karena belum ada lahan yang pasti untuk TPS dan TPA yang sudah direncanakan dikarenakan kurangnya dana dan lahan yang sulit dicari.yang ada di daerah paranginan, gunungtua, kecamatan padang bolak. Namun melihat produksi sampah yang hampir setiap tahun bertambah, kapasitas TPS yang ada saat ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk menampung sampah tersebut, selain pengadaan TPA yang begitu mendesak, penambahan alat transportasi pengangkut sampah dan tenaga kerja untuk tim kebersihan saat ini juga sangat dibutuhkan. Karena kurangnya alat transportasi dan tenaga kerja untuk tim kebersihan mengakibatkan banyaknya tumpukan sampah di pinggir jalan.

Pada kabupaten padang lawas utara terutama kecamatan padang bolak, dinas yang berperan dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan

pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah adalah dinas lingkungan hidup padang lawas utara. Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 pasal 10 ayat (1) mengatakan bahwa setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah. maka masyarakat sebagai penghasil sampah juga memiliki tanggung jawab untuk menunjang upaya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara, menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam, mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk kemasan yang sudah digunakan.

Daerah layanan kebersihan/ persampahan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 adalah :

1. Kelurahan Pasar Gunungtua kecamatan Padang Bolak
2. Pasar Purbabangun Desa Rondaman Dolok kecamatan Portibi
3. Pasar Siunggam Kecamatan Padang Bolak Tenggara.

Volume produksi sampah di Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar 219.611,28 m³. Sedangkan Volume sampah yang ditangani sebesar 12.592,5 m³. Rendahnya volume sampah yang ditangani disebabkan belum semua daerah Kabupaten Padang Lawas Utara mendapat pelayanan persampahan disebabkan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki daerah. Berdasarkan SNI T-13-1990-F, perkiraan dinas lingkungan hidup volume rata-rata timbulan sampah adalah 2,25 liter/jiwa/hari, maka diperoleh produksi sampah pada tahun 2019 sebesar 219.611,28 m³. Kemudian volume sampah yang ditangani dibandingkan

dengan volume produksi sampah kabupaten, diperoleh penanganan sampah kabupaten pada tahun 2019 sebesar 5,73%.

Sarana pengangkutan sampah di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

No	Sarana	Jumlah (unit)	Kondisi (unit)	
			Baik	Rusak
1.	Becak Motor	19	15	4
2.	Dump truck	2	2	-
3.	Armroll truck	5	1	4

Maka dari itu pemerintah daerah kabupaten padang lawas utara harus lebih respon dan melakukan tindakan dalam pengelolaan sampah dengan menyediakan atau pembangunan TPA, memfasilitasi sarana dan prasarana, dan pengelolaan TPA serta memanfaatkan kembali sampah menjadi nilai ekonomis. Untuk itu yang menjadi perhatian dan fokus dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui penyelenggaraan pengelolaan sampah yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dalam Rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Di Padang Lawas Utara**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah peneliti adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Padang Lawas Utara terutama di Kecamatan Padang Bolak

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Padang Lawas Utara terutama di Kecamatan Padang Bolak

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dan akademis

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dalam bidang keilmuan khususnya di bidang sosial sertamampu menjadikan bahan evaluasi terhadap program pemerintah dalam mengembangkan kebijakan selanjutnya.

b. Praktis

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar mengenai bentuk pengelolaan sampah serta dampak bagi masyarakat di sekitarnya.

c. Akademis

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten, agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, pada penelitian proposal ini peneliti membuat suatu sistematika dengan membagi tulisan menjadi 5 (lima) bagian yaitu :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian

BAB II : URAIAN TEORITIS

Menguraikan teori-teori tentang implementasi kebijakan publik, penyelenggaraan pengelolaan sampah

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian,

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban dari narasumber-narasumber

BAB V : PENUTUP

Memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang di teliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Kebijakan Publik

Menurut Djadja saefullah dalam (tachjan 2006:9) kebijakan publik tersebut dapat dipahami dari dua perspektif, yakni perspektif politik dan perspektif administrasi. Dimana perspektif politik dalam proses kebijakan bernuansa kepentingan sementara dalam perspektif administrasi kebijakan publik merupakan ikhwal berkaitan dengan system, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik di dalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang diinginkan dicapai dapat diwujudkan di dalam realitas.

Menurut Pressman dan Widavsky dalam (Winarno 2002:17) mendefenisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalakan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta.

Menurut dunn (2003:106) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas tugas pemerintahan, seperti pertahanan, keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain lain.

Adapun faktor yang mempengaruhi kebijakan publik menurut Wahab (2004-148) mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi kebijakan publik :

a) komunikasi (communication), pelaksanaan kebijakan untuk memahami fungsi dan tugasnya. Implementasi dituntut dapat secara konsisten dan konsekuen dan bertindak sesuai apa yang terjadi dengan tujuan yang ada

b). Sumber daya (resource), implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik itu menyangkut sumber daya manusia, dana fasilitas lainnya

c). Sikap implementator (disposition), kebijakan implementasi akan terlaksana dengan baik apabila implementatornya bersikap baik dan bersungguh – sungguh dan penuh rasa bertanggung jawab dalam pelaksanaannya

d). Struktur birokrasi (bureaucratic structure), meskipun sumber daya sudah tersedia implementatornya sudah tau apa yang harus dilakukan atau memahami fungsi dan tugasnya namun pelaksanaannya juga masih dihadapkan pada struktur birokrasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang dibuat oleh pemerintah menyangkut kepentingan-kepentingan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

2.2 Pengertian Implementasi

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Menurut Patton dan Sawicki dalam (Tangkisan 2003:9) implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah di seleksi.

Menurut muzmanian (2014:139) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam keputusan-keputusan kolektif penting atau badan peradilan.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Menurut Majone dan Wildavsky dalam (Nurdin 2004-34) implementasi adalah sebagai evaluasi dan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan

Menurut Erwan (2012:12) implementasi adalah mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan suatu kebijakan.

Wayne (2005:560) mengemukakan adanya lima kondisi atau syarat untuk implementasi yang sempurna;

- a). bahwa implementasi ideal itu adalah produk dari organisasi yang perlu seperti militer, dengan garis otoritas yang tegas
- b). bahwa Norma – norma akan ditegakkan dan tujuan ditentukan
- c). bahwa orang akan melaksanakan apa yang diminta dan diperintahkan
- d) bahwa harus ada komunikasi yang sempurna didalam dan diantara organisasi
- e) bahwa tidak tekanan waktu.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses usaha yang dijalankan oleh suatu badan pemerintah yang memiliki otoritas yang diberikan oleh peraturan-peraturan dalam melaksanakan kebijakan yang telah disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan atau program.

2.3 Implementasi kebijakan publik

Nugroho (2004:158) mengatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada

dua langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Tangklisan (2003:1) implementasi kebijakan publik adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan kebijakan seperti halnya dalam pasal-pasal sebuah undang undang legeslatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kebijakan.

Menurut Van Mater dan Varn Horn dalam buku Winarno (2008:146) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun faktor penghambat implementasi kebijakan publik Tangklisan (2003:11) ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu ;

- a). komunikasi yaitu persyaratan pertama yang dalam pelaksanaan yang efektif adalah bahwa yang melaksanakan tugas tersebut mengetahui apa

yang harus dilakukan, selanjutnya dalam komunikasi ini perlu adanya konsistensi dari apa yang seharusnya dilakukan

b). sumber daya yaitu sumber daya disini maksudnya adalah berupa sumber daya manusia atau meliputi staf – staf dengan keahlian yang baik untuk informasi, wewenang dan fasilitas – fasilitas dalam menerjemahkan suatu pertemuan dalam pelaksanaannya, staf tersebut harus memadai jumlahnya dalam melaksanakan suatu program, namun tidak hanya jumlah tetapi juga harus didukung oleh keahlian yang baik dalam tugas tersebut, informasi menyangkut bagaimana melaksanakan suatu hal dan data ketaatan dari personil – personil lain terhadap peraturan pemerintah, wewenang adalah otoritas yang dimiliki oleh pelaksanaan dalam melakukan tugasnya termasuk dalam penerapan sanksi jika ada pelanggaran, apakah sudah cukup memadai mutlak diperlukan dalam melakukan tugas tertentu, seperti bangunan fisik, kendaraan dan lain – lain.

Dari uraian definisi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses tindakan-tindakan atau pembuatan keputusan yang dilakukan oleh organisasi publik untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya .

2.4 Sampah

Menurut Hadiwiyoto Hartanto (2006-27) mendefinisikan sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan perlakuan baik karena telah diambil

bagian utamanya atau karena pengolahan atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan gangguan kesehatan atau gangguan kelestarian.

Menurut Nasih (2010:1) sampah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan manusia yang berwujud padat (baik berupa zat organik maupun anorganik yang bersifat dapat terurai maupun tidak terurai dan dianggap tidak berguna lagi dan di buang ke lingkungan.

Dari uraian definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa sampah adalah suatu yang tidak diperlukan dan tidak ada manfaatnya kemudian dibuang ke lingkungan

2.4 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan adalah proses atau cara mengelola, sedangkan sampah adalah benda yang berbentuk padat dari bahan basah maupun kering yang sudah tidak terpakai lagi. Maka pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Menurut Suyono (2019:129) Pengelolaan sampah adalah sesuatu kegiatan pengendalian sampah mulai dari tempat penyimpanan sementara, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampai dengan pembuangan akhir dengan menggunakan teknik sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat dan lingkungan. Kegiatan pengelolaan ini menyangkut administrasi, manajemen, aspek legal, teknologi tepat guna dan peran serta masyarakat.

Notoatmodjo (2007:191) mengemukakan bahwa pengelolaan sampah adalah meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau pengelolaan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak menjadi gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Dari defenisi di atas penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah adalah suatu proses kegiatan untuk menangani timbulan sampah meliputi pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir.

BAB III

METODE PENELITIAN

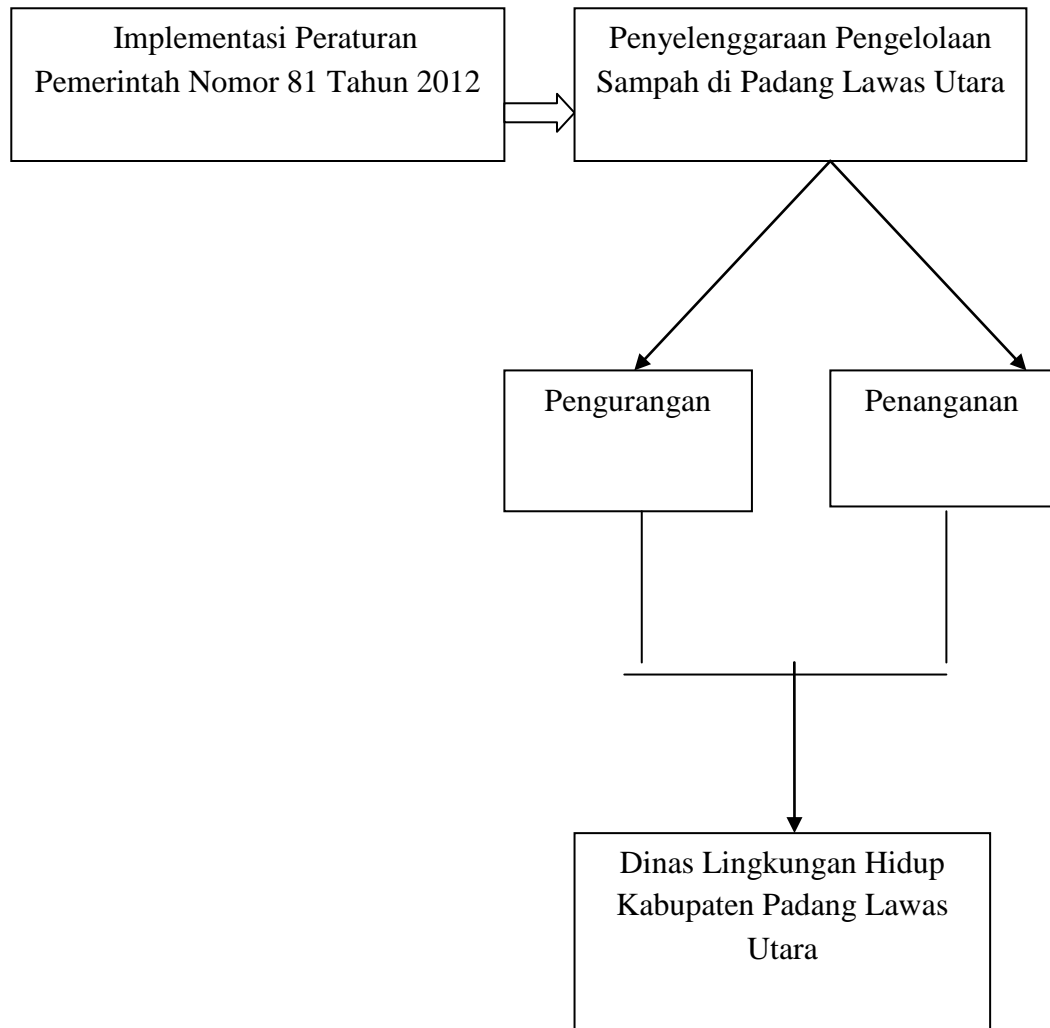
3.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan cara yang sistematis untuk mengumpulkan data dan mempersentasikannya. Sugiyono (2017:15) mengemukakan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang akan diterapkan pada penelitian kali ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel, penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.

Penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan angka. Mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif. Metode penelitian kualitatif terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan. Metode kualitatif menggunakan interview secara mendalam, dan observasi berperan serta dalam mengumpulkan data.

Creswell dalam (Sugiyono 2017:40) penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.2 Kerangka Konsep



Dari gambar diatas dapat dilihat kerangka konsep yang dibuat oleh peneliti dengan judul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dalam Rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. yang terdiri dari dua variabel yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. sebagai objek penelitian yang akan didapat informasi dan datanya adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara

3.3 Definisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah atau defenisi yang akan digunakan untuk menggambar secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian. Maka dalam penelitian ini digunakan konsep sebagai berikut:

- a. Kebijakan publik adalah proses usaha yang dijalankan oleh suatu badan pemerintah yang memiliki otoritas yang diberikan oleh peraturan-peraturan dalam melaksanakan kebijakan yang telah disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan atau program.
- b. Implementasi kebijakan publik adalah proses tindakan-tindakan atau pembuatan keputusan yang dilakukan oleh organisasi publik untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c. Sampah adalah suatu yang tidak diperlukan dan tidak ada manfaatnya kemudian dibuang kelingkungan.
- d. Pengelolaan sampah adalah suatu proses kegiatan untuk menangani timbulah sampah meliputi pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Penyusunan kategorisasi merupakan tahapan penting dalam penelitian ini, kategorisasi berhubungan dengan bagaimana subjek dan objek dalam penelitian ini. Kategorisasi yang ditentukan merupakan campuran dari beberapa indikator yang sudah peneliti tentukan.

Kategorisasi Penelitian

No	Kategorisasi	Indikator
1	Implementasi Kebijakan Publik	<ul style="list-style-type: none">• adanya tindakan• Adanya keputusan• Adanya tujuan
2	Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah	<ul style="list-style-type: none">• Pengurangan sampah• Penanganan sampah

3.5 Narasumber

Dalam penelitian kualitatif. Narasumber merupakan kunci bagi peneliti dalam memberikan mainformasi. Narasumber penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian dalam (Bungin, 2007:76)

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan yang berkompeten atau mengetahui informasi tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Di Padang Lawas Utara, yaitu:

a. 2 (dua) orang pegawai pekerja Dinas Lingkungan Hidup Padang Lawas Utara.

1. Nama : Gerlinakani Harahap SP
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Usia : 33 Tahun
Jabatan : Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup Padang Lawas Utara

2. Nama : Hamdan Almuzahid, S.Hut, MM
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Usia : 35 Tahun
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Lingkungan Padang Lawas Utara

b. 4 (empat) orang pengelola TPS/TPA Padang Lawas Utara.

1. Nama : Ansor Ramadan Harahap
Jenis Kelamin : laki- laki
Agama : Islam
Usia : 25 Tahun
Pekerjaan : Pengelolaan TPS/TPA Padang Lawas Utara

2. Nama : Syahrial Harahap
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam

Usia : 30 Tahun

Pekerjaan : Pengelola TPS/TPA Padang Lawas Utara

3. Nama : Bibi Harahap

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Usia : 24 Tahun

Pekerjaan : Pengelola TPS/TPA Padang Lawas Utara

4. Nama : Iswandi

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Usia : 32 Tahun

Pekerjaan : Pengelola TPS/TPA

c. 4 (empat) orang petugas kebersihan Padang Lawas Utara

1. Nama : Nelly Harahap

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Usia : 40 Tahun

Pekerjaan : Petugas Kebersihan Padang Lawas Utara

2. Nama : Kolom Harahap

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Usia : 51

Pekerjaan : Petugas Kebersihan Padang Lawas Utara

3. Nama : Samson Siregar
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Usia : 48
Pekerjaan : Petugas Kebersihan Padang Lawas Utara
4. Nama : Doli Harahap
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Usia : 26 Tahun
Pekerjaan : Petugas Kebersihan Padang Lawas Utara

d. 4 (empat) orang masyarakat Padang Lawas Utara

1. Nama : Jefri Tarigan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Usia : 27 Tahun
Pekerjaan : Sekretaris desa GunungTua
2. Nama : Lastri Harahap
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Usia : 46 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
3. Nama : Derman Harahap
Jenis Kelamin : Laki-Laki

- Agama : Islam
- Usia : 46 Tahun
- Pekerjaan : Wiraswasta
4. Nama : Pita Hasibuan
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- Usia : 27 Tahun
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data agar menjadi sistematis, data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, karena data yang diperoleh akan dijadikan landasan dalam mengambil kesimpulan. Agar data yang dikumpulkan baik dan benar instrumen pengumpulan datanya pun harus baik, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (soekanto 2007-52). Untuk memperoleh data primer. Data yang didapatkan secara langsung melalui kegiatan sebagai berikut :

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung dengan yang diwawancarai

Observasi atau yang disebut pula pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, peraba dan pengecap

Informen penelitian adalah subjek atau pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Untuk menentukan informen peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling adalah, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi peneliti

b. Data skunder

Untuk memperoleh data sekunder, diperlukan cara dengan studi kepustakaan melalui membaca, mengutip, menyalin, dan menganalisis wacana, data, teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3.7 Teknik Analisis Data

Bogden dalam (Sugiono 2001:140) teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam mengambil kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis interaktif. Terdapat tiga komponen dalam teknik analisis ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data. Merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstrak data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian.

Penyajian data. Merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis

Penarikan kesimpulan. Adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa di pertanggung jawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pematapan penelusuran data.

3.8 Waktu dan lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana kita melakukan penelitian dan pengumpulan data yang kita perlukan dalam melakukan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Padang Lawas Utara.

3.9 Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup selama kurun waktu tahun 2008-2013. Namun demikian, pengelolaan lingkungan hidup masih dihadapkan pada banyak permasalahan. Upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tidak sebanding dengan pemanfaatan sumber daya alam yang melampaui batas. Keadaan ini semakin diperparah dengan terjadinya fenomena perubahan iklim. Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Padang Lawas Utara masih akan dihadapkan pada

pencemaran air, udara, sampah, terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi. Adapun permasalahan kerusakan lingkungan, terutama berkaitan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang saat ini umumnya sudah tercemar ringan, sedang hingga tercemar berat. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan, terutama terkait dengan pencemaran asap lintas batas. Pada akhirnya, kerusakan lingkungan yang terus meningkat akan memiliki dampak negatif pada aspek ekonomi dan sosial. Berbagai perkiraan kerugian yang disebabkan oleh dampak kerusakan lingkungan, menunjukkan angka yang sangat signifikan. Penyelenggaraan pembangunan bidang lingkungan hidup selama ini disadari telah mampu menjadikan lingkungan hidup yang lebih baik bagi masyarakat, meskipun belum seluruhnya memuaskan. Oleh karena itu untuk mencapai masyarakat dengan lingkungan hidup yang baik perlu diselenggarakan pembangunan yang berkelanjutan melalui pelaksanaan program secara menyeluruh, terarah dan terpadu dengan berdasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup dan Target Millenium Development Goals (MDG's). Kebijakan dan strategi yang ditetapkan diharapkan agar perencanaan dan pelaksanaannya mampu mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat, upaya-upaya di bidang lingkungan sendiri harus mengutamakan upaya promosi dan preventif yang proaktif tanpa mengabaikan upayakuratif dan rehabilitatif. Untuk menghadapi hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai pelaku pembangunan di bidang lingkungan harus mempunyai perencanaan strategik sebagai dasar

tindakan dan kegiatan. Sejalan dengan itu, berubahnya penyelenggaraan negara dengan sistem otonomi daerah juga memberi perubahan alur perencanaan dari top down menjadi bottom up dan Peraturan Daerah Nomor 9 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam mencegah Pencemaran Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Padang Lawas. Dimana program pembangunan nasional mengharuskan setiap lembaga pemerintah untuk menyusun Rencana Strategi sebagai dasar pembangunan lima tahun kedepan. Rencana strategi ini dirumuskan dengan fleksibel dengan maksud dapat beradaptasi untuk menghadapi perubahan-perubahan lima tahun kedepan dan disusun dengan mempertimbangkan semua aspek yang terkait.

3.9.2 Visi Dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Padang Lawas Utara

Dinas lingkungan Hidup Padang Lawas Utara juga memiliki visi yaitu :
”Dalam rangka mewujudkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat” Serta Misi :

- a) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang proaktif di bidang lingkungan hidup
- b). Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- c). Melaksanakan koordinasi dan kemitraan untuk mewujudkan integrase, sinkronisasi dan harmonisasi program lingkungan
- d). Mengembangkan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- e). Mengoptimalkan penegakan hokum lingkungan

f). Mengembangkan sarana dan prasarana persampahan

3.9.3 Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Padang Lawas Utara

Dinas Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup daerah. Adapun fungsi dinas Lingkungan Hidup Padang Lawas Utara Yaitu:

- a). perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b). pemfasilitasian dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
- c). perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
- d). perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan serta penanggulangan pencemaran.
- e). perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan analisis pengelolaan kualitas lingkungan.
- f). perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan upaya pengendalian kualitas lingkungan hidup
- g). pelaksanaan pelayanan umum
- h). pengelolaan urusan ketatausahaan
- i). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.9.4 Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara

Untuk menjabarkan serta mewujudkan visi dan misi, maka disusun tujuan dan sasaran. Tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut:

- a). Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup yang responsive terhadap perubahan kebijakan dan kondisi lingkungan.
- b). Mengurangi tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- c). Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dalam program-program pengelolaan lingkungan.
- d). Menyediakan data dan informasi lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk pengembangan kebijakan dan pelayanan masyarakat.
- e). Menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- f). Mendukung upaya pengelolaan lingkungan hidup.

3.9.5 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi diperlukan untuk membedakan wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya keterkaitan antar bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi berfungsi untuk menyelenggarakan tugas dengan tujuan yang diinginkan. Dengan struktur organisasi masing-masing pegawai tahu akan tugas, wewenang, dan tanggung

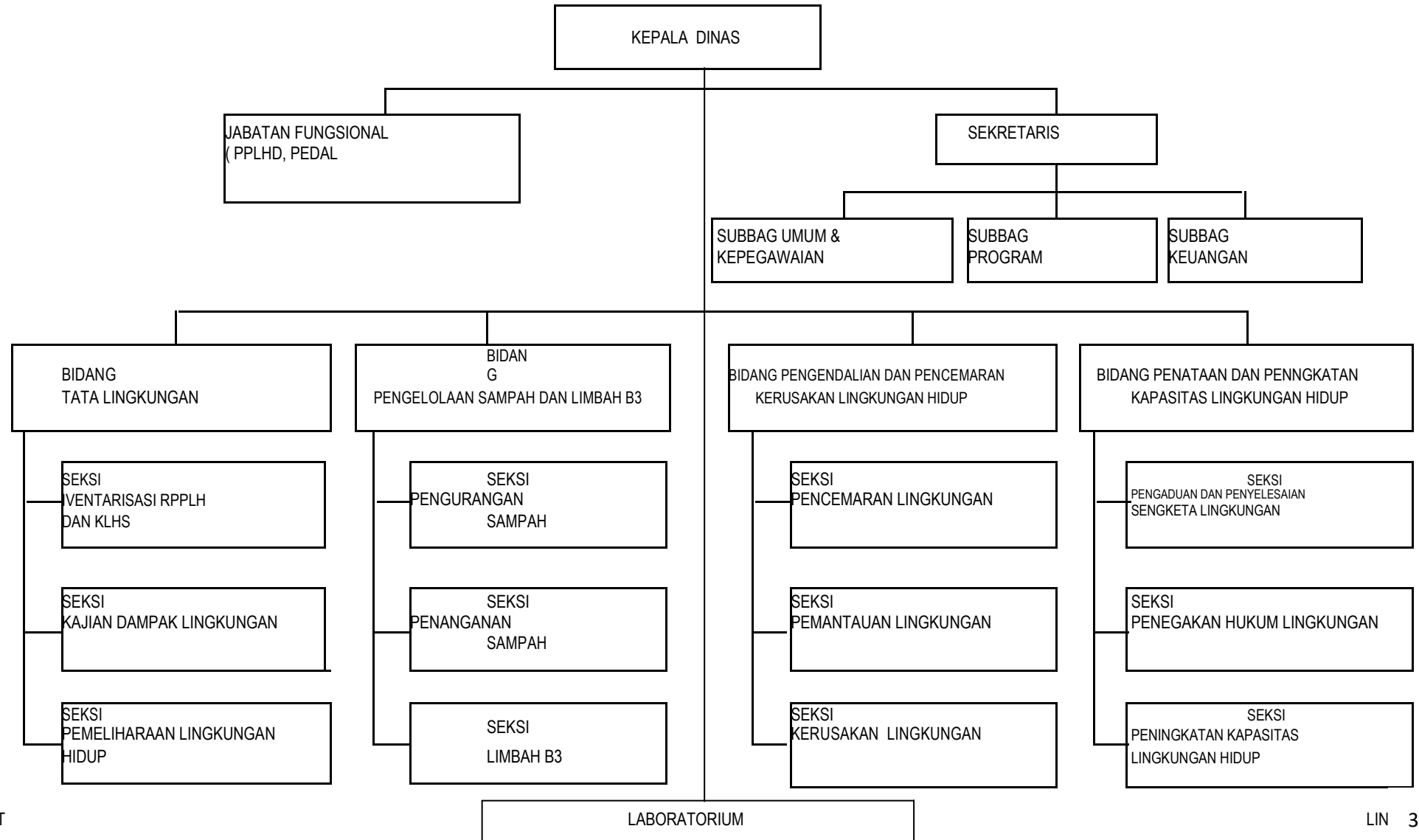
jawab sehingga para pegawai tersebut dengan sendirinya mengerjakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan tanggungjawab.

Untuk mencapai tujuan organisasi, diperlukan suatu wadah yang mengatur seluruh aktivitas organisasi yang disusun dalam suatu struktur organisasi dalam instansi. Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan dapat diterapkan, sehingga efisiensi dan efektifitas kerja dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai.

Suatu instansi terdiri dari berbagai unit kerja yang dapat dilaksanakan perseorangan, maupun kelompok kerja yang berfungsi untuk melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu dan mencakup tata hubungan secara vertical, melalui saluran tunggal.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas Utara Sebagai Berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



3.9.6 Uraian Tugas

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b) Uraian Tugas Kepala Dinas :

1. Merumuskan program kerja dan kegiatan baik rutin maupun kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2. menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan dinas lingkungan hidup sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
3. mengkoordinasikan para kepala bidang dan bawahan, agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung
4. mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada sekretaris dan para kepala bidang secara berjenjang sesuai dengan bidang permasalahannya
5. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan dinas lingkungan hidup dengan sekretaris, kepala bidang dan bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian sasaran
6. memberikan data dan informasi mengenai situasi dinas lingkungan hidup serta memberikan saran dan pertimbangan kepada

Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan

7. mendisposisikan surat masuk sesuai dengan bidang permasalahannya
8. memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas
9. mengendalikan pengelolaan keuangan dan ketatausahaan serta perlengkapan dinas
10. membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang lingkungan hidup
11. mengatur, membina, mengendalikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas untuk mencapai sasaran tugas serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan
12. mengawasi, mengendalikan, memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dinas untuk mengetahui perkembangan, hambatan, dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya
13. menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan

c. bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan, menyusun, dan mengelola kebijakan teknis di bidang penataan dan penuaan serta penerapan instrumen pencegahan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Penyusunan konsep kebijakan penyelenggaraan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis
2. Pelaksanaan penyelenggaraan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Kajian Lingkungan Hidup Strategi
4. Penyusunan kajian dan evaluasi daya dukung, daya tampung lingkungan serta kajian resiko lingkungan
5. Penyusunan NSDA dan LH (Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup)

6. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah
7. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
8. Pelaksanaan penyelenggaraan penilaian dokumen lingkungan, rekomendasi perizinan lingkungan hidup dan PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
9. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan penilaian dokumen lingkungan, rekomendasi perizinan lingkungan hidup dan PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
10. Penyusunan konsep kebijakan pengawasan, penataan hukum lingkungan hidup dan penanganan pengaduan lingkungan hidup
11. Pelaksanaan koordinasi pengawasan lingkungan hidup dan penanganan pengaduan dan sengketa lingkungan
12. Pelaksanaan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
13. Pelaksanaan pengawasan pencemaran air, udara, tanah, pengelolaan sampah dan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)
14. Penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara, pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)
15. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara, pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dalam satu daerah Kabupaten

16. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terkait perizinan penyimpanan sementara, pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dalam satu daerah Kabupaten
 17. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat
 18. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 19. Penyusunan konsep kebijakan peningkatan peran dan kerjasama mitra lingkungan
 20. Pelaksanaan koordinasi peningkatan peran dan kerjasama mitra lingkungan;
- d. bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan, menyusun, dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penerapannya dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan secara berkelanjutan. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi sumber pencemaran dan kawasan rawan pencemaran air, udara dan tanah
2. Pelaksanaan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah
3. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah
4. Penentuan baku mutu lingkungan
5. Pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap pencemaran air, udara dan tanah
6. Penentuan baku mutu sumber pencemar
7. Penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan)
8. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
9. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
10. Penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian dilapangan atau yang dikenal dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan, maka data-data tersebut di deskripsikan sehingga penelitian implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dalam Rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Di Padang Lawas Utara dapat terjawab.

Untuk mendukung perolehan data. Data skunder dan data priemer sangat membantu untuk menjelaskan hasil yang terkait dnegan tingkat krakteristik jawaban narasumber, selanjutnya hasil wawancara akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan sifat metode penelitian deskriptif kualitatif.

Wawancara dilakukan pada tanggal 24 Januari sampai dengan 9 februari di Padang Lawas utara. Dengan berbagai narasumber yaitu Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup Padang Lawas Utara, Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, penegelola TPS/TPA, Petugas Kebersihan, dan masyarakat Padang Lawas Utara.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tertentu kepada narasumber yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam

menganalisis penelitian ini.berikut peneliti akan menyajiakan data yang diperoleh dari hasil penelitian, adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini di sesuaikan dengan indikator dalam penelitian yang merupakan kunci guna menjawab fenomena yang diteliti.

4.1.1 keputusan

Sampah merupakan produk samping dari aktivitas kehidupan masyarakat. Sampah ini lama-lama akan menjadi bencana bagi masyarakat dan juga dapat merusak lingkungan hidup apabila sampah tersebut tidak dikelola dengan baik, Dinas Lingkungan Hidup Padang Lawas Utara Saat ini salah satu pihak yang diharapkan dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dengan ini tentu dinas lingkungan hidup yang berwenang dalam memberikan keputusan dalam menangani sampah yang ada di Padang Lawas Utara. Berikut pernyataan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Padang Lawas Utara, berikut wawancara yang dilakukan :

“Kami perlu cepat dalam mengambil langkah dan upaya untuk menangani persampahan yang ada di Padang Lawas Utara. Dengan TPS (tempat pembuangan sampah sementara) dan TPA (tempat pembuangan sampah akhir) yang belum satabil atau belum beroperasi dengan baik maka beberapa alternatif dan solusi yang akan dipertimbangkan yaitu membuat lokasi baru, dan penerapan / perbaikan lokasi yang sudah ada. .”(Hasil wawancara dengan bapak Hamdan Almuzahid, S.Hut, MM pada hari jumat 24 Januari 2020)

Dalam memilih alternatif ini, banyak kriteria yang harus dipertimbangkan dari aspek manfaat, peluang, biaya dan resiko yang terjadi. Banyak hal yang harus segera diperbaiki oleh pemerintah daerah, apalagi ini ada menyangkut lingkungan

hidup, saya berharap sampah ini bisa kita buat menjadi sampah yang bermanfaat bagi masyarakat dengan melakukan pengelolaan sampah yang dijadikan kompos, agar bisa membantu perekonomian masyarakat

Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana keputusan yang sudah diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah di Padang Lawas Utara selanjutnya penulis mewawancarai kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup Padang Lawas Utara

“Kami sudah memberikan fasilitas yang sudah disiapkan yang dapat mengurangi jumlah penumpukan sampah di Padang Lawas Utara seperti adanya peengangkut dan pengumpul sampah penyediaan kotak sampah dilokasi tertentu sebagai wadah sampah.”(Hasil Wawancara dengan ibu Gerlinakani Harahap, SP pada hari jumat 24 Januari 2020)

berbagai fasilitas pengangkut dan pengumpul sampah seperti kendaraan roda tiga, dan truk pengangkut sampah juga sudah disediakan. Hal ini adalah salah satu alat penunjang kebutuhan dalam proses penanganan samapah di Padang Lawas Utara. Sedangkan dalam proses pengumpulan sampah, pengumpulan sampah dilakukan oleh petugas kebersihan dengan cara pengambilan langsung dari rumah kerumah, dimana pengumpulan sampah ini menggunakan alat pengumpul berupa becak motor, dump truck, dan amroll truck yang kemudian sampah dibawa ke TPS (tempat pembuangan sementara)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber disimpulkan bahwa penerapan lokasi TPA dan TPS dalam pengelolaan sampah di Padang Lawas Utara dilakukan dengan pengadaan sarana seperti pembuatan wadah sampah

dalam mempermudah penanganan sampah, hal ini adalah tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.

Dalam pengadaan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Padang Lawas Utara dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah guna untuk mempermudah untuk penanganan sampah.

4.1.2 Tindakan

untuk mengatasi sampah demi terciptanya lingkungan hidup yang bersih perlu dilakukan tindakan untuk mengurangi sampah yang semakin hari semakin meningkat, seperti adanya penanganan, pengelolaan dan pengurangan sampah secara efektif, Dinas Lingkungan Hidup Padang Lawas Utara merupakan pihak yang berwenang dalam permasalahan yang berkaitan dengan sampah Di Padang lawas utara, dan juga sangat di butuhkan partisipasi dari berbagai unsur dalam melakukan tindakan dan sasaran untuk mencapai tujuan dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012.

Maka dari itu peneliti mencoba mencari tahu mengenai tindakan apa saja yang dilakukan Dinas Lingkung Hidup Padang Lawas Utara dalam mengatasi sampah.adapun wawancara dengan Kepala Bidang pengendalian Lingkungan Di Padang Lawas Utara dalam melakukan tindakan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dalam Rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah:

“Tindakan yang dibuat pemerintah daerah untuk sementara TPS (tempat pembuangan sementara) berada di lahan masyarakat dengan status sewa. Dan TPS (tempat pembuangan sementara)”.(Hasil wawancara dengan bapak Hamdan Almuzahud, S.Hut,MM pada hari jum’at 24 Januari 2020)

relokasi tempat pembuangan sampah sementara dan akhir (TPS/TPA) pada dasarnya sudah lama di programkan pada tahun 2017. Namun masih terkendala dengan lahan yang dituju. Namun tahun ini Dinas Lingkungan Hidup tetap fokus dalam melaksanakan program tersebut, hanya saja kendalanya kemana direlokasikan TPS-nya. Karena tempat saat ini sangat susah untuk dicari.

Begitu juga dengan pernyataan yang diberikan kepala bidang tata lingkungan hidup tentang apakah tindakan yang dilakukan oleh dinas Lingkungan Hidup untuk pengelolaan sampah di Padang Lawas Utara. Berikut wawancara yang dilakukan:

“Mengingat TPS di Padang Lawas Utara belum maksimal dan untuk saat ini tindakan yang kami lakukan menyiapkan tong sampah sebagai wadah sampah di pinggir jalan dan mengusulkan adanya bank sampah”.(Hasil wawancara dengan Ibu Gerlinakani Harahap SP pada hari jum'at 24 Januari 2020)

. Dari penjelasan hasil wawancara diatas relokasi TPS dan TPA masih terkendala, kerjasama saat ini sangat dibutuhkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Padang Lawas Utara dalam penyelenggaraanya karena pengelolaan sampah melibatkan unsur pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang atau pembuangan material sampah. dengan ini sampah mendapatkan perlakuan khusus, karena pengelolaan sampah ini bertujuan untuk mengurangi sampah yang ada di lingkungan.

Sementara itu pihak dari Dinas Lingkungan Hidup lebih berupaya untuk mengusulkan merelokasi TPA/TPS dan agar adanya bank sampah untuk memberikan inovasi pengelolaan sampah yang dapat dijadikan nilai ekonomis

yang lebih baik. Mengingat dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang meliputi Pengurangan dan Penanganan perlunya perubahan pradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu dikumpulkan, diangkut kemudian dibuang menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah. kegiatan pengurangan sampah bermakna agar seluruh lapisan masyarakat baik pemerintah, maupun masyarakat luas melaksanakan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah,pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah yang lebih dikenal dengan Reduce, Reuce, dan Recycle (3R) melalui upaya – upaya cerdas, efesien dan terprogram.

4.1.3 Tujuan

Tujuan merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan suatu kegiatan, tujuan diharapkan dapat memberikan nilai positif yang ditimbulkan dari suatu aktifitas yang di lakukan. Mencapai suatu tujuan merupakan kegiatan yang mempunyai proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran yang dapat diimplementasikan melalui program atau formulasi kebijakan.

Target dan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Padang Lawas Utara adalah untuk menjadikan Kabupaten Padang Lawas Utara yang sehat, nyaman, dan bebas dari samapah, untuk memelihara dan meningkatkan kualitas pelayanann sistem pengelolaan sampah maka peneliti mencari tau upaya apa yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai tujuan tersebut.

Penggunaan indikator ini adalah untuk mengukur bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah apakah memiliki tujuan yang diharapkan, maka peneliti perlu mengetahui tujuan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.

Peneliti melakukan wawancara dengan kepala bidang pengendalian lingkungan. Berikut hasil dari wawancaranya.

“Kami fokus dalam meningkatkan kualitas pelayanan sistem pengelolaan sampah, mensosialisasikan tentang sampah dan cara menjaga lingkungan agar bebas dari sampah lewat kegiatan – kegiatan yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan serta penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.”(Hasil wawancara dengan Bapak Hamdan Almujaheed, S.Hut,MM pada hari jum’at 24 Januari 2020)

Dengan adanya upaya tersebut sangat perlu adanya pemantauan langsung kelapangan agar tidak ada terjadi timbulan sampah sehingga membantu dalam melestarikan lingkungan dan meningkatkan kedisiplinan kerja, memperbanyak tenaga operasional kebersihan., dan mensejahterakan pekerja jalan seperti tukang sapu, dan memberikan pendidikan kesehatan bagi pekerja pengangkut sampah

Wawancara serupa juga dilakukan oleh kepala bidang tata lingkungan hidup, untuk mengetahui lebih dalam upaya dalam mencapai tujuan. Berikut hasil wawancaranya :

“Kami bertindak tegas dan memberikan denda kepada masyarakat yang melakukan pembuangan sampah ke lingkungan yang sudah ditentukan seperti sungai dan selokan.”(Hasil wawancara dengan Ibu Gerlinakani Harahap SP pada hari jum’at 24 Januari 2020)

Dalam ahl ini tentunya sangat perlu memberikan pelayanan terutama dalam penyuluhan dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat perihal sampah walaupun masih banyak kekurangan didalamnya. Tak hanya itu kekurangan sarana dan prasarana pengelolaan sampah juga menjadi salah satu masalah, untuk itu perlu adanya peningkatan kualitas layanan yang disesuaikan dan didukung juga oleh peningkatan sarana dan prasarana

Adapun kesimpulan wawancara yang diperoleh dri narasumber bahwa tujuan yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah untuk melestariakan lingkungan dan mengurangu timbulan sampah.

Hanya ada beberapa kendala yang di masih dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan tersebut seperti kurangnya sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah harus ditingkatkan.

4.1.4 sudah terimplementasi

Kemudian untuk mengetahui bagaimana suatu kebijakan tersebut apakah sudah terimplementasi dengan baik maka peneliti melakukan wawancara dnegan kepala bidang pengendalian lingkungan, berikut hasil wawancaranya:

“Saat ini pengelolaan sampah belum bisa terimplementasi dengan baik, karena masih banyak kendala untuk merelokasi lahan TPA dan TPS.Pada dasarnya TPS dan TPA sudah di programkan dari tahun lalu untuk direlokasi, namun masih terkendala dengan lahan yang dituju. .”(Hasil wawancara dengan Bapak Hamdan Almujaheed, S.Hut,MM pada hari jum’at 24 Januari 2020)

Tidak jauh beda dengan hasil wawancara penulis dengan kepala bidang tata lingkungan hidup, berikut hasil wawancaranya:

“Persoalan sampah di padang lawas utara belum sepenuhnya teratasi dengan baik, TPS/TPA semunya masih mangkrak atau tidak berjalan sebagaimana mestinya.”(Hasil wawancara dengan Ibu Gerlinakani Harahap SP pada hari jum’at 24 Januari 2020)

Pengelolaan Sampah Di Padang Lawas Utara tidak akan dapat berkerja dengan baik, jika pemerintah bergerak sendiri, pengelolaan sampah membutuhkan keterlibatan masyarakat secara sistematis. dan juga dalam melakukan pengelolaan sampah sangat membutuhkan dana untuk memenuhi sarana dan prasarana, dana saat ini belum memadai untuk memaksimalkan pengelolaan sampah, dalam arti masyarakat Padang lawas utara harus diedukasi dan investor dibidang pengelolaan sampah diyakinkan masuk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber disimpulkan bahwa pengelolaan sampah dipadang lawas utara belum bisa teratasi dengan baik, kerena susahnya mencari lahan untuk TPS dan TPA, dan dana untuk melakuakan pengelolaan sampah juga saat ini tidak memungkinkan sehingga pengelolaan sampah sat uni sangat terkendala.

Dalam melaksanakan pengelolaan sampah agar berjalan dengan baik kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup Dengan masyarakat sangat diperlukan, masyarakat harus diedukasi dan pengelolaan sampah didukung oleh investor-investor nasional agar kegiatan pengeloaan sampah berjalan dengan baik.

4.1.5 Pengurangan dan penanganan

kegiatan pengurangan dan penanganan sampah sangat bermakna agar seluruh lapisan masyarakat baik pemerintah dan juga dunia usaha maupun masyarakat luas melaksanakan kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah. agar timbunan sampah berkurang, penanganan dan pengurangan sampah atau pengelolaan sampah merupakan langkah- langkah yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah sampah dari material yang tidak berguna menjadi material yang memiliki nilai ekonomis. Dan mengelola sampah menjadi material yang tidak membahayakan lingkungan hidup. Jika penanganan sampah dilakukan dengan baik maka akan memberikan manfaat seperti menghemat sumber daya alam, menghemat energy, menghemat lahan tempat pembuangan akhir, dan lingkungan menjadi bersih, asri, sehat dan nyaman.

Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana bentuk kerjasama pengelola TPS /TPA dalam melakukan penyelenggaraan penanganan dan pengurangan atau disebut dengan pengelolaan sampah di Padang Lawas Utara, maka peneliti perlu mewawancarai beberapa orang petugas Pengelola TPS/TPA Padang Lawas Utara. berikut hasil wawancaranya:

“Kami selalu bekerjasama untuk selalu mengupayakan agar sampah dikelola dengan baik dan di proses dengan baik dari tahap awal mulai dari timbunan sampah itu sendiri.”(Hasil wawancara dengan Bapak Ansor Ramadan Harahap pada hari Senin 27 Januari 2020)

“Fasilitas TPS/TPA di Padang Lawas utara belum memadai, tekanan penduduk yang semakin bertambah jumlahnya disertai dengan tingginya tingkat konsumsi masyarakat pada akhirnya mengakibatkan jumlah sampah yang juga semakin

meningkat.lahan untuk perluasan TPS/TPA sangat dibutuhkan.”(Hasil wawancara dengan Bapak Bibi Harahap pada hari Senin Januari 27 Februari 2020)

“Adapun tahapan yang kami lakukan adalah pengangkutan sisa akhir sampah, sampah yang tidak dapat didaur ulang atau tidak dapat dimanfaatkan lagi di TPS sekitar 10-20 % sampah menuju TPA.”(Hasil wawancara dengan Bapak syahrial Harahap pada hari Senin Januari 27 Februari 2020)

“Banyak kendala yang sering terjadi dalam melakukan pengelolaan sampah.Setersediaan tempat penampungan sampah sementara dan tempat pembuangan akhir serta armada pengangkut sampah tidak sebanding dengan produksi sampah.”(Hasil wawancara dengan Bapak Iswandi pada hari Senin Januari 27 Februari 2020)

Dengan adanya upaya ini setidaknya dapat mengurangi sampah yang harus dikumpulkan dan diangkut ke TPS sehingga bebannya jadi berkurang Pada fase ini barulah proses penimbunan atau pembakaran sampah akhir dapat dilakukan dengan menggunakan incinerator. Tahapan ini sebenarny terletak pada rantai proses di tingkat rumah tangga dan tingkat kelurahan/desa yaitu TPS. Yang melibatkan langsung masyarakat sebagai pengelola. Tanpa sistem ini mustahil sampah yang ada di Padang Lawas Utara ini diatasi dengan tuntas,tahapan ini sebenarnya bertujuan untuk:

1. Membudidayakan cara pembuangan sampah yang baik mulai dari lingkungan rumah tangga hingga ke TPS dengan menggunakan kresek.
2. Menata TPS menjadi pusat pemanfaatan sampah organic dan anorganik secara maksimal.
3. Menciptakan usaha baru di tingkat masyarakat, yang akhirnya akan memandirikan masyarakat dalam mengelola sampahnya sendiri.”(Hasil

wawancara dengan Bapak syahrial Harahap pada hari Senin Januari 27 Februari 2020)

Untuk itu perlu upaya untuk membuat lokasi TPS/TPA, hal ini diharapkan agar dapat mengurangi volume sampah, sehingga mempermudah manajemen pengelolaan sampah. Sebab ketersediaan sarana tersebut tidak sebanding dengan produksi sampah setiap hari. Kalau hanya bicara TPS/TPA masalah sampah tidak akan selesai. karena suatu waktu TPS/TPA akan penuh tidak dapat lagi menampung sampah. peran masyarakat juga sangat dibutuhkan demi kelancaran pengelolaan sampah di Padang Lawas Utara. Dengan adanya upaya ini setidaknya dapat mengurangi sampah yang harus dikumpulkan dan diangkut ke TPS sehingga bebannya jadi berkurang

Dari hasil wawancara dari beberapa narasumber dari pihak Pengelola TPS/TPA dapat disimpulkan bahwa penanganan dan pengurangan sampah masih tidak stabil (belum berjalan dengan baik). Lahan TPS/TPA belum terealisasi dengan baik membuat pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan dan penanganan tidak maksimal. Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah banyak unsur yang harus terlibat dalam pelaksanaannya terutama masyarakat, dengan ketersediaan TPS/TPA yang belum terealisasi dengan baik, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, soalnya sampah organik bisa diolah menjadi kompos dengan memberdayakan masyarakat. Sementara sampah anorganik seperti plastik bisa didaur ulang dan bernilai ekonomis. Dengan demikian sampah yang diangkut menuju TPS/TPA hanya berupa residu atau sampah yang tidak lagi bisa dimanfaatkan, dengan cara itu sampah yang akan dibuang ke TPS/TPA akan

berkurang ini bisa menjadi solusi mengenai masalah TPS/TPA yang belum terealisasi.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Padang Lawas Utara tentunya ada kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Petugas Kebersihan dalam melakukan penanganan dan pengurangan sampah tersebut dalam hal ini Peneliti juga perlu untuk mewawancarai petugas kebersihan mengenai penanganan dan pengurangan sampah di Padang Lawas Utara.

“Koordinasi yang kami lakukan dengan dinas lingkungan hidup padanglawas utara kami selaku petugas kebersihan slalu melakukan pembersihan di pinggir jalan, dan sebagian melakukan pembersihan diselokan, setelah seluruh sampah sudah terkumpul petugas kebersihan melakukan pengangkutan setiap harinya menuju ke TPS Padang Lawas Utara. .”(Hasil wawancara dengan Ibu Nelly Harahap pada hari Selasa Januari 28 Februari 2020)

“Sarana dan prasarana yang sudah disiapkan untuk petugas kebersihan masih jauh dri kata mencukupi, baik dari sisi jumlah petugas kebersihan maupun alat.”(Hasil wawancara dengan Bapak Kolom Harahap pada hari Selasa Januari 28 Februari 2020)

“Pengangkutan sampah di Padang Lawas utara slalu kami upayakan mengangkat sampah di beberapa titik yang ada Padang Lawas Utara,kadang rutin kadang ada kendala sehingga pengangkutan sampah trkadang tidak rutin, yang biasanya sekali sehari terkadang mnjadi 2 hari sekali.”(Hasil wawancara dengan Bapak Samsons Siregar pada hari Selasa Januari 28 Februari 2020)

“Kendala yang sering dialami petugas kebersihan sarana dan prasarana kurang, jumlah petugasnya sedikit, sehingga tidak bisa melakukan operasi pembersihan dengan maksimal.”(Hasil wawancara dengan Bapak Doli Harahap pada hari Selasa Januari 28 Februari 2020)

Pengembangan kebutuhan persampahan sangat dibutuhkan.Perlu adanya kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dan masyarakat Padang Lawas Utara dan juga minimnya sarana dan prasarana kebersihan tersebut membuat sulit

untuk melakukan aktifitas dalam melakukan kebersihan. Jumlah petugas kebersihan bisa dikatakan kurang, sehingga berdampak lambatnya penanganan sampah, terutama di lokasi pasar dan pemukiman warga

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber dapat disimpulkan dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah petugas kebersihan dan pemerintah harus bekerja sama menyiapkan sarana dan untuk agar dalam melaksanakan kebersihan berjalan dengan baik, begitu juga kerjasama dengan masyarakat juga perlu, membuang sampah ketempat yang sudah disediakan oleh petugas kebersihan karena kita semua mempunyai tujuan yang sama yaitu mengurangi timbulan sampah dan menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.

Peneliti juga mewawancarai beberapa masyarakat di Padang Lawas Utara untuk mengetahui bagaimana proses dalam penanganan dan pengurangan sampah di Padang Lawas Utara karena dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah peran masyarakat sangat dibutuhkan agar pengurangan dan penanganan sampah dapat berjalan dengan baik. Berikut hasil wawancaranya:

“Tindakan yang dilakukan dinas lingkungan hidup sekarang adanya pembuatan tong sampah di setiap titik tertentu, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat cara pembuangan sampah yang baik.” (Hasil wawancara dengan Bapak Jefri Tarigan pada hari Rabu Januari 29 Januari 2020)

menjadikan sampah non organik menjadi bahan baku untuk diolah menjadi bahan daur ulang (kertas, kaca, plastic) dan sebagainya sangat banyak manfaatnya yaitu:

1. Untuk membuat kembali bahan yang sudah tak dipakai seperti plastic, kertas, kembali ke bentuk semula supaya bisa dipakai lagi
2. Mengurangi pencemaran tanah
3. Mengurangi sampah yang sudah banyak dipemukiman masyarakat
4. Memberikan pekerjaan kepada yang bisa mendaur ulang sampah menjadi benda yang bernilai tinggi

Hal ini sudah dilakukan oleh beberapa sekolah seperti SMA 1 Negeri Gunungtua, Pondok Pesantren sungai dua.

“Pengurangan dan penanganan sampah di Padang Lawas Utara belum terlihat maksimal, masih banyaknya sampah bertumpuk-tumpuk. Dan membusuk di pinggir jalan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Riswan Siregar pada hari Rabu Januari 29 Februari 2020)

“Pengangkutan sampah di Padang Lawas utara kadang lama kadang sudah cepat pernah disini sampah dibiarkan berhari-hari sampai membusuk.” (Hasil wawancara dengan ibu Lastri Harahap pada hari Rabu Januari 29 Februari 2020)

tidak rutinnya pengangkutan sampah membuat timbunan sampah banyak di depan rumah masyarakat dan dipinggir jalan. Sering terjadi pembusukan sampah dipinggir jalan, dan masih banyak titik yang memerlukan tong sampah, kurangnya tong sampah dipinggir jalan membuat sampah semakin cepat mengalami penumpukan.

“Pengaruh dari beberapa tindakan yang dilakukan dinas lingkungan hidup yaitu dengan adanya tong sampah yang disediakan di beberapa titik membuat beberapa titik sampah tidak bertumpuk parah.” (Hasil wawancara dengan Derman Harahap pada hari Rabu Januari 29 Februari 2020)

dulu sebelum adanya tong sampah tersebut banyak warga yang membuang sampah sembarangan ke pinggir sungai, sebagian membakar, sebagian

di tanam di belakang rumah, dan sekarang sampah sudah bisa dibuang ke TPS/TPA. Tapi hanya beberapa sampah yang diangkat ke TPS/TPA masih banyak warga yang membakar dan menanam atau dibuang sembarangan karena pengangkutan sampah yang tidak menentu dan ketersediaan sampah yang kurang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber disimpulkan bahwa penyediaan penanganan dan pengurangan sampah belum berpengaruh besar, masih adanya timbunan sampah karena pengangkutan sampah yang tidak stabil dan tong sampah yang kurang di beberapa titik. Pengangkutan sampah sangat mempengaruhi timbunan sampah yang makin lama dibiarkan mengakibatkan pembusukan yang mengganggu kenyamanan masyarakat.

Perlu adanya koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dengan masyarakat Padang Lawas Utara, menghimbau seluruh masyarakat menjaga kebersihan lingkungan karena lingkungan yang sehat memberikan banyak manfaat terutama dalam pengendalian penyakit, oleh karena itu sangat disarankan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan memenuhi titik yang kekurangan tong sampah, memisahkan jenis sampah, tidak membuang sampah sembarangan, mendaur ulang sampah, pembuatan pupuk kompos misalnya memanfaatkan kaleng dan bekas diubah menjadi sebuah pot bunga dan bahkan kita bisa menghiasinya kemudian melakukan gotong royong guna untuk menjaga kekompakan antar warga agar bisa sama sama mewujudkan kebersihan lingkungan yang dibutuhkan semua orang.

4.2 Pembahasan

Untuk menjawab rumusan masalah peneliti yang tertulis dalam bab satu yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dalam Rangka Pengelolaan Sampah Di Padang Lawas Utara, maka penulis akan menganalisis semua data yang diperoleh dari hasil penelitian seperti apa yang disajikan pada hasil penelitian. Dari seluruh data dan informasi yang sudah didapatkan melalui studi dan wawancara dengan Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, Pengelola TPS/TPA, Petugas Kebersihan, dan 4 (empat) warga Padang Lawas Utara. Data yang sudah diperoleh sudah disusun oleh penulis secara sistematis pada bagaian sebelumnya, baik melalui wawancara dilokasi penelitian dan juga data – data sekunder berupa berkas maupun catatan – catatan yang diperoleh penulis dilapangan sebagai data pendukung penelitian ini.

Selanjutnya data tersebut akan diberikan analisis tentang tindakan, keputusan dan tujuan dalam penyelenggaran pengelolaan sampah di dinas Lingkunga Hidup Padang Lawas Utara, dalam melakukan analisis data yang telah disajikan pada bagian sebelumnya akan disesuaikan dengan menggunakan teori teori yang berhubungan dengan kegiatan penelitian ini sehingga analisis yang dilakukan oleh penulis dapat di sajikan dengan baik.

4.2.1 Bagaimana Implementasi Peraturan pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dalam Rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

Implementasi dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang – Undang implementasi di pandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan Undang –Undang dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama – sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan – tujuan kebijakan atau program – program.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah. Bahwa program kerja sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari realisasi dari program kerja yang sudah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Padang Lawas Utara yaitu adanya keputusan, tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Seperti pengadaan sarana pembuatan wadah sampah dalam mempermudah penanganan sampah, merelokasi TPA/TPS dan bank sampah guna untuk memberikan inovasi pengelolaan sampah yang lebih baik. Guna untuk melestarikan lingkungan agar tetap menjadi bersih, asri, sehat, dan nyaman dan juga mengurangi timbulan sampah yang dapat mengganggu kesehatan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Van Meter dan Varn Horn dalam buku Winarno (2008: 146) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan – tindakan dalam keputusan keputusan sebelumnya. Tindakan – tindakan ini mencakup

usaha – usaha untuk mengubah keputusan – keputusan menjadi tindakan – tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha – usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan – keputusan kebijakan yang dilaksanakan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan.

4.2.2 Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

Dinas Lingkungan Hidup Padang Lawas Utara sangat berperan dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang meliputi Penanganan dan pengurangan agar dapat mengurangi timbulan sampah. Adapun fungsi dan tanggung jawab Dinas Lingkungan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Padang Lawas Utara yaitu menyediakan pembangunan TPS/TPA, menyediakan sarana dan prasarana TPS/TPA, menyediakan pengangkutan sampah dari lingkungan masyarakat hingga ke TPS/TPA, menyediakan sarana dan prasarana untuk petugas kebersihan seperti memaksimalkan jumlah petugas, dan memenuhi wadah sampah atau tong sampah di beberapa titik yang belum ada tong sampah. Kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat cara membudidayakan membuang sampah yang baik mulai dari lingkungan rumah hingga ke tempat pembuangan sampah, dengan menggunakan box terpisah antara sampah organik dan nonorganik.

Hal ini sesuai dengan pendapat Suyono (2019:129) pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan pengendalian sampah mulai dari tempat penyimpanan sementara, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan sampai dengan pembuangan

akhir dengan menggunakan teknik sesuai dengan prinsip – prinsip kesehatan masyarakat dan lingkungan. Kegiatan pengelolaan ini menyangkut administrasi, manajemen, aspek legal, teknologi tepat guna dan peran serta masyarakat.

4.2.3 Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian Undang Undang nomor 81 tahun 2012 di Dinas Lingkungan Hidup Padang Lawas Utara

Dalam pelaksanaan kegiatan- kegiatan ada saja hambatan yang sering dialami Dinas Lingkungan Hidup seperti sulitnya mencari lahan untuk pembangunan TPS/TPA di Padang Lawas utara. Lahan pembangunan TPS/dan TPA adalah salah satu yang menjadikan penyelenggaraan pengelolaan sampah tidak berjalan dengan baik, kurangnya dana dan sulitnya mencari lahan menjadikan tujuan untuk mengelola sampah mengalami hambatan, dengan adanya hambatan ini Dinas Lingkungan Hidup selalu mengupayakan agar semua berjalan dengan baik.

Masyarakat juga merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Padang Lawas Utara. Di karenakan setiap pemikiran dan pandangan masyarakat berbeda-beda, menjadikan sasaran tujuan mengalami hambatan, namun bukan berarti pemikiran dan pemahaman mereka tersebut tidak dapat diubah.

Hal ini sesuai dengan faktor penghambat implementasi kebijakan publik Tangkisan (2003:11) ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu ;

a). komunikasi yaitu persyaratan pertama yang dalam pelaksanaan yang efektif adalah bahwa yang melaksanakan tugas tersebut mengetahui apa yang harus dilakukan, selanjutnya dalam komunikasi ini perlu adanya konsistensi dari apa yang seharusnya dilakukan

b). sumber daya yaitu sumber daya disini maksudnya adalah berupa sumber daya manusia atau meliputi staf – staf dengan keahlian yang baik untuk informasi, wewenang dan fasilitas – fasilitas dalam menerjemahkan suatu pertemuan dalam pelaksanaannya, staf tersebut harus memadai jumlahnya dalam melaksanakan suatu program, namun tidak hanya jumlah tetapi juga harus didukung oleh keahlian yang baik dalam tugas tersebut, informasi menyangkut bagaimana melaksanakan suatu hal dan data ketaatan dari personil – personil lain terhadap peraturan pemerintah, wewenang adalah otoritas yang dimiliki oleh pelaksanaan dalam melakukan tugasnya termasuk dalam penerapan sanksi jika ada pelanggaran, apakah sudah cukup memadai mutlak diperlukan dalam melakukan tugas tertentu, seperti bangunan fisik, kendaraan dan lain – lain.

BAB V

PENUTUP

5.1 kesimpulan

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dalam Rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah maka sangat diperlukan model pengelolaan sampah yang baik dan tepat untuk dikembangkan agar kualitas lingkungan dan kesehatan dapat ditingkatkan serta sampah dapat menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan publik merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan birokrasi pemerintahan kepada masyarakat. Pelaksanaan pelayanan publik dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Didalam Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik didefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelaksanaan pelayanan publik dimaksud untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. hingga saat ini pelayanan publik bidang pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian serius dari pemerintah Indonesia karena menyangkut aspek kesehatan dan aspek lingkungan hidup.

Dengan adanya keputusan, tindakan dan tujuan adalah suatu bentuk kegiatan atau program yang dilakukan secara terorganisasi dengan secara bersama – sama dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah untuk memelihara lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pada bagian ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil informasi dan data mengenai pengelolaan sampah di Padang Lawas Utara. Adapun beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini guna menjawab tujuan penelitian yang telah dirumuskan adalah :

1. Operasi dalam melakukan pengangkutan sampah sarana dan prasarana sangat mempengaruhi keberhasilan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, seperti sumber daya manusia yang tidak maksimal dan kendaraan dalam proses pengangkutan yang kurang mengakibatkan pengangkutan tidak stabil.
2. Perlu adanya pemahaman untuk penanganan dan pengurangan sampah sedini mungkin agar dapat mengurangi sampah dari sumbernya yaitu masyarakat. karena pemahaman dalam pengelolaan sampah dan menjaga lingkungan hidup masih kurang dalam hal tersebut. Maka perlu dilakukan pembinaan dan sosialisasi dalam melakukan pengelolaan sampah tersebut.
3. Sarana dan prasarana yang tidak maksimal seperti kurangnya lahan dan dana untuk pembangunan TPA mengakibatkan adanya kesulitan dalam pengelolaan sampah

4. Kurangnya pendalaman beberapa aspek dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, seperti aspek biaya, operasional pengangkutan dan penentuan lokasi pengadaan prasarana sampah

5.2 Saran

Adapun saran untuk studi lanjutan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yaitu diharapkan dapat melengkapi dan menambahkan kekurangan – kekurangan dari penelitian agar menghasilkan pengelolaan sampah yang baik.

Adapun saran untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagai berikut:

1. Memenuhi sarana dan prasaran dalam melakuakn operasi pengangkutan sampah dengan menambah Sumber daya manusia dan kendaraan dalam proses pengangkutan sampah agar lebih stabil
2. Mengkaji tentang aspek pembiayaan/dana, sistem operasi pengangkutan sampah, dan mengkaji lahan untuk TPS/TPA guna untuk mendukung peyelenggaraan pengelolaan sampah.
3. Dibutuhkan sosialisasi menyeluruh dan berkesinambungan pengelolaan sampah kepada masyarakat yang mau mengurangi atau mengelola sampah yang dihasilkan.
4. Perlunya tim pengawas untuk segala macam permasalahan dan mengawasi masalah sampah di Padang Lawas Utara. dengan adanya tim tersebut diharapkan segala masalah sampah dapat diatasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajahmada University Press
- Mazmanian.Sabatier. 2004.*Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Rinneka Cipta. Jakarta.
- Nugroho, D. Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang (model-model Perumusan Implementasi dan Evaluasi)*. PT. Elex Media Komputindo : Jakarta
- Notoatmodjo, S. 2007. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nurdin., Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Raja Grafindopersada : Jakarta
- Purwanto, Erwanagus. 2012. *Implementasi Kebijakan Public Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Gava Media : Yogyakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan Penelitian Evaluasi)*. Alfabeta : Bandung
- Susyono. Budiman. 20019. *Ilmu Kesehatan Masyarakat Dalam Konteks Kesehatan Lingkungan*. EGC 2010. Jakarta

Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung – Puslit KP2W
LemitUnpad Bandung.

Tangklian, Hessel. Nogi.2003. *KebijakanPublik yang
Membumi*. Yogyakarta: YPAPI

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi :Teori, proses
danStudiKomparitif*. Center of academic publishing service. Yogyakarta.

JURNAL:

Widihartanto. 2006. *Kinerja Pengolahan Sampah Di Kota Gembong Kabupaten
Kebumen* :Semarang

Sujarwo, Trisanti, 2014. *Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik*. Yogyakarta.

WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

(Pegawai Dinas Kebersihan Padang Lawas Utara)

Nama : Gerlina Kani Harahap

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Usia : 33 Tahun

Pekerjaan : Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup

1. Keputusan

a). Tanya : Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adakah keputusan yang diambil Dinas Kebersihan Dalam melakukan Pengelolaan sampah di padang Lawas Utara?

b). jawab : ada.

a).Tanya : Keputusan apa yang diambil dinas lingkungan hidup dalam melakukan pengelolaan sampah Di padang Lawas Utara?

b).Jawab :pada saat ini pengelolaan sampah di Padang Lawas Utara belum begitu efektif karena sampah- sampah dari masyarakat masih dikumpulkan kemudian dibakar ataupun ditimbun. Hal ini dilihat bahwa banyaknya sampah yang tercecer, atau banyak kebiasaan masyarakat membuang sampah di selokan.Adapun fasilitas yang sudah disiapkan yang

dapat mengurangi jumlah penumpukan sampah di Padang Lawas Utara seperti adanya penyediaan kotak sampah di lokasi tertentu sebagai wadah sampah. dari kondisi lapangan sistem pewadahan masih tercampur dan wadah sampah yang masih umum digunakan oleh masyarakat wadah sampah plastik wadah sampah tong sampah. berbagai fasilitas pengangkut dan pengumpul sampah seperti kendaraan roda tiga, dan truk pengangkut sampah juga sudah disediakan. Hal ini adalah salah satu alat penunjang kebutuhan dalam proses penanganan sampah di Padang Lawas Utara. Sedangkan dalam proses pengumpulan sampah, pengumpulan sampah dilakukan oleh petugas kebersihan dengan cara pengambilan langsung dari rumah ke rumah, dimana pengumpulan sampah ini menggunakan alat pengumpul berupa becak motor, dump truck, dan amroll truck yang kemudian sampah dibawa ke TPS.

2. Tindakan

a). tanya : Apakah tindakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam Penyelenggaraan Pengelolaan sampah di Padang Lawas Utara?

b). jawab : Kami selaku pihak yang juga berwenang dalam memberikan tindakan atas pengelolaan sampah Di Padang Lawas utara selalu terus melakukan kerjasama dengan petugas kebersihan atau pekerja lapangan maupun pengelola TPS dan TPA dengan pengurangan dan penanganan guna untuk memperlancar program relokasi pembuangan

sampah. dan pihak kami selalu memantau petugas kebersihan dalam melakukan pemungutan sampah dari awal sampai akhir. Kalau nanti sudah terelokasi dengan baik maka kami akan mengadakan inovasi seperti bank sampah dan lainnya.

3. Tujuan

a). Tanya : Adakah tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah?

b). Jawab : Ada

a). Tanya : Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai, apa upaya yang dilakukan Dinas lingkungan hidup untuk mencapai tujuan tersebut?

b). Jawab : kami bertindak tegas dan memberikan denda kepada masyarakat yang melakukan pembuangan sampah ke lingkungan yang sudah ditentukan seperti sungai dan selokan. Kami sudah memberikan pelayanan terutama dalam penyuluhan dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat perihal sampah walaupun masih banyak kekurangan didalamnya. Tak hanya itu kekurangan sarana dan prasarana pengelolaan sampah juga menjadi salah satu masalah, untuk itu perlu adanya peningkatan kualitas layanan yang disesuaikan dan didukung juga oleh peningkatan sarana dan prasarana.

4. Apakah sudah terimplementasi dengan baik

a). Tanya : Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sudah terimplementasi dengan baik?

b). Jawab : Persoalan sampah di padang lawas utara belum sepenuhnya teratasi dengan baik, TPS/TPA semunya masih mangkrak atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pengelolaan Sampah Di Padang Lawas Utara tidak akan dapat berkerja dengan baik, jika pemerintah bergerak sendiri, pengelolaan sampah membutuhkan keterlibatan masyarakat secara sistematis.dan juga dalam melakukan pengelolaan sampah sangat membutuhkan dana untuk memenuhi sarana dan prasarana,dana saat ini belum memadai untuk memaksimalkan pengelolaan sampah, dalam arti masyarakat Padang lawas utara harus diedukasi dan investor dibidang pengelolaan sampah diyakinkan masuk.

Nama :Hamdan Almuzahid, S.Hut, MM

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Usia : 35 Tahun

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup

1. Keputusan

a) Tanya : Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adakah keputusan yang diambil

Dinas Kebersihan Dalam melakukan Pengelolaan sampah di padang Lawas Utara?

b). Jawab : Ada

a). Tanya : Keputusan apa yang diambil dinas lingkungan hidup dalam melakukan pengelolaan sampah Dipadang Lawas Uatara?

b). Jawab :kami perlu cepat dalam mengambil langkah dan upaya untuk menangani persampahan yang ada di Padang Lawas Utara. Dengan TPS/TPA yang belum satabil atau belum beroperasi dengan baik maka beberapa alternatif dan solusi yang akan dipertimbangkan yaitu membuat lokasi baru, dan penerapan / perbaikan lokasi yang sudah ada. Dalam memilih alternatif ini, banyak kriteria yang harus dipertimbangkan dari aspek manfaat, peluang, biaya dan resiko yang terjadi. Banyak hal yang harus segera kita perbaiki, apalagi ini ada menyangkut lingkungan hidup, saya berharap sampah ini bisa kita buat menjadi sampah yang bermanfaat bagi masyarakat dengan melakukan pengelolaan sampah yang dijadikan kompos, agar bisa membantu perekonomian masyarakat

2. Tindakan

a). Tanya :Apakah tindakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam Penyelenggaraan Pengelolaan sampah di Padang Lawas Utara

b). Jawab : relokasi tempat pembuangan sampah sementara dan akhir (TPS/TPA) pada dasarnya sudah lama di programkan pada tahun 2017. Namun masih terkendala dengan lahan yang dituju.Tahun 2015 tindakan

yang dibuat pemerintah daerah untuk sementara TPS (tempat pembuangan sementara) berada di lahan masyarakat dengan status sewa. Dan TPS (tempat pembuangan sementara) namun tahun ini kita masih fokus dalam melaksanakan program, hanya saja kendalanya kemana kita relokasikan TPS-nya. Itulah persoalannya.

3. Tujuan

a). Tanya : Adakah tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup dalam Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah?

b). Jawab : Ada

a). Tanya : Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai, apa upaya yang dilakukan Dinas lingkungan hidup untuk mencapai tujuan tersebut?

b). Jawab : kami fokus dalam meningkatkan kualitas pelayanan sistem pengelolaan sampah, mensosialisasikan tentang sampah dan cara menjaga lingkungan agar bebas dari sampah lewat kegiatan – kegiatan yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan serta penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Tujuan yang kami tentukan juga dengan memantau langsung kelapangan agar tidak ada terjadi timbulan sampah sehingga membantu dalam melestarikan lingkungan dan meningkatkan kedisiplinan kerja, memperbanyak tenaga operasional kebersihan. Memperbnyak tenaga operasional kebersihan, dan mensejahterakan pekerja jalan seperti tukang sapu, dan memberikan pendidikan kesehatan bagi pekerja pengangkut sampah

4. Apakah sudah terimplementasi dengan baik

a). Tanya : Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sudah terimplementasi dengan baik?

b). Jawab : saat ini pengelolaan sampah belum bisa terimplementasi dengan baik, karena masih banyak kendala untuk merelokasi lahan TPA dan TPS. Pada dasarnya TPS dan TPA sudah di programkan dari tahun lalu untuk direlokasi, namun masih terkendala dengan lahan yang dituju.

HASIL WAWANCARA

(Pengelola TPS/TPA)

Nama : Ansor Ramadan Harahap

Jenis Kelamin : laki- Laki

Agama : Islam

Usia : 25 Tahun

Pekerjaan : Pengelolaan TPS/TPA Padang Lawas Utara

a) Tanya : Bagaimana bentuk Kerjasama yang dilakukan pihak DinasLingkungan Hidup dalam melakukan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Padang Lawas Utara?

b). Jawab : kami selalu bekerja sama dalam mengupayakan agar sampah dikelola dengan baik dan di proses dengan baik dari tahap awal mulai dari timbunan sampah itu sendiri. Dengan adanya upaya ini setidaknya dapat mengurangi sampah yang harus dikumpulkan dan diangkut ke TPS sehingga bebannya jadi berkurang.

Nama : Syahrial Harahap

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Usia : 30 Tahun

Pekerjaan : Pengelola TPS/TPA Padang Lawas Utara

a). Tanya : Adakah tahapan yang dilakukan pengelola TPS/TPA dalam pengelolaan sampah?

b). Jawab : adapun tahapan yang kami lakukan adalah pengangkutan sisa akhir sampah, sampah yang tidak dapat didaur ulang atau tidak dapat dimanfaatkan lagi di TPS sekitar 10-20 % sampah menuju TPA. Pada fase ini barulah proses penimbunan atau pembakaran sampah akhir dapat dilakukan dengan menggunakan incinerator. Tahapan ini sebenarnya terletak pada rantai proses di tingkat rumah tangga dan tingkat kelurahan/desa (yaitu TPS). Yang melibatkan langsung masyarakat sebagai pengelola. Tanpa sistem ini mustahil sampah yang ada di Padang Lawas Utara ini diatasi dengan tuntas,tahapan ini sebenarnya bertujuan untuk:

4. Membudidayakan cara pembuangan sampah yang baik mulai dari lingkungan rumah tangga hingga ke TPS dengan menggunakan kresek.
5. Menata TPS menjadi pusat pemanfaatan sampah organik dan anorganik secara maksimal.
6. Menciptakan usaha baru di tingkat masyarakat, yang akhirnya akan memandirikan masyarakat dalam mengelola sampahnya sendiri

Nama : Bibi Harahap

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Usia : 24 Tahun

Pekerjaan : Pengelola TPS/TPA Padang Lawas Utara

a) Tanya : Apakah Fasilitas TPS/TPA sudah memadai untuk pengelolaan sampah di Padang Lawas Utara?

b) Jawab : Fasilitas TPS/TPA di Padang Lawas utara belum memadai, tekanan penduduk yang semakin bertambah jumlahnya disertai dengan tingginya tingkat konsumsi masyarakat pada akhirnya mengakibatkan jumlah sampah yang juga semakin meningkat. lahan untuk perluasan TPS/TPA sangat dibutuhkan. Untuk itu perlu upaya untuk membuat lokasi TPS/TPA, hal ini diharapkan agar dapat mengurangi volume sampah, sehingga mempermudah manajemen pengelolaan sampah.

Nama : Iswandi

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Usia : 32 Tahun

Pekerjaan : Pengelola TPS/TPA

a) Tanya : Adakah Kendala yang dihadapi pengelola TPS/TPA dalam melakukan pengelolaan sampah ?

b). Jawab : Banyak kendala yang sering terjadi dalam melakukan pengelolaan sampah. Setersediaan tempat penampungan sampah sementara dan tempat pembuangan akhir serta armada pengangkut sampah. Sebab ketersediaan sarana tersebut tidak sebanding dengan produksi sampah setiap hari. Kalau hanya bicara TPS/TPA masalah sampah tidak akan selesai. Sebab suatu waktu TPS/TPA akan penuh tidak dapat lagi menampung sampah. peran masyarakat juga sangat dibutuhkan demi kelncaran pengelolaan sampah di Padang Lawas Utara

HASIL WAWANCARA

(Petugas Kebersihan)

Nama : Nelly Harahap

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Usia : 40 Tahun

Pekerjaan : Petugas Kebersihan Padang Lawas Utara

a) Tanya : Adakah koordinasi yang dilakukan dinas lingkungan hidup dengan petugas kebersihan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Padang Lawas Utara?

b) Jawab : ada

a) Tanya : koordinasi yang seperti apa yang sudah dilakukan dinas lingkungan hidup dengan petugas kebersihan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di padang lawas utara?

b) Jawab : koordinasi yang kami lakukan dengan dinas lingkungan hidup padanglawas utara kami selaku petugas kebersihan slalu melakukan pembersihan di pinggir jalan, dan sebagian melakukan pembersihan diselokan, setelah seluruh sampah tersebut dimasukkan ke dump truck lalu

petugas dari Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengangkutan setiap harinya menuju ke TPS Padang Lawas Utara.

Nama : Kolom Harahap

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Usia : 51

Pekerjaan : Petugas Kebersihan Padang Lawas Utara

a) Tanya : Sarana prasarana apa yang sudah disediakan oleh dinas kebersihan untuk petugas kebersihan

b) Jawab : Sarana dan prasarana yang sudah disiapkan untuk petugas kebersihan masih jauh dari kata mencukupi, baik dari sisi jumlah petugas kebersihan maupun alat. Minimnya sarana dan prasarana kebersihan tersebut membuat sulit untuk melakukan aktifitas dalam melakukan kebersihan. Jumlah petugas kebersihan bisa dikatakan kurang, sehingga berdampak lambatnya penanganan sampah, terutama di lokasi pasar dan pemukiman warga.

Nama : Samson Siregar

Jenis Kelamin : laki-laki

Agama : Islam

Usia : 48 tahun

Pekerjaan : Petugas Kebersihan Padang Lawas Utara

a) Tanya : Apakah pengangkutan sampah Di Padang Lawas Utara rutin Dilakukan?

b) Jawab : pengangkutan sampah di Padang Lawas utara slalu kami upayakan mengangkat sampah di beberapa titik yang ada di Padang Lawas Utara,kadang rutin kadang ada kendala sehingga pengangkutan sampah trkadang tidak rutin, yang biasanya sekali sehari terkadang mnjadi 2 hari sekali.

Nama : Doli Harahap

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Usia : 26 Tahun

Pekerjaan : Petugas Kebersihan Padang Lawas Utara

a) Tanya : Adakah kendala yang dihadapi oleh petugas kebersihan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah?

b) Jawab : kendala yang sering dialami petugas kebersihan sarana dan prasarana kurang, jumlah petugasnya sedikit, sehingga tidak bisa

melakukan operasi pembersihan dengan maksimal. Pengembangan kebutuhan persampahan sangat dibutuhkan. Perlu adanya kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dan masyarakat Padang Lawas Utara.

HASIL WAWANCARA

(Masyarakat)

Nama : Jefri Tarigan

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Usia : 27 Tahun

Pekerjaan : Sekretaris desa GunungTua

a) Tanya : Adakah Tindakan yang sudah dilakukan oleh dinas kebersihan dalam penanganan dan pengurangan sampah di Padang Lawas Utara?

b) Jawab : Ada

a) Tanya : Tindakan yang seperti apa yang sudah dilakukan dinas lingkungan hidup dalam penanganan dan pengurangan sampah di Padang Lawas Utara

a) Jawab :Tindakan yang dilakuka dinas lingkungan hidup skarang adanya pembuatan tong sampah di setiap titik tertentu, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat cara membudidayakan cara pembungan sampah yang baik mulai dari lingkungan rumah hingga ketempat pembuangan sampah, dengan menggunakan kantong box terpisah antara

sampah organik dan non organik. Dan mnjadikan sampah non organik menjadi bahan baku untuk diolah menjadi bahan daur ulang (kertas, kaca, plastic) dan sebagainya. Hal ini sudah dilakukan oleh beberapa sekolah seperti SMA 1 Negeri Gunungtua, Pondok Pesantren sungai dua.

Nama : Lastri Harahap

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Usia : 46 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

a) Tanya : Apakah tindakan pengurangan dan penanganan sampah sudah berjalan dengan baik?

b) Jawab : pengurangan dan penanganan sampah di Padang Lawas Utara belum terlihat maksimal, masih banyaknya sampah bertumpuk-tumpuk. Sering terjadi pembusukan sampah dipinggir jalan, dan masih bnyak titik yang memerlukan tong sampah, kurangnya tong smapah dipinggir jalan mmbuat sampah semakin cepat mengalami penumpukkan.

Nama : Derman Harahap

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Usia : 46 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

a) Tanya : Berapa hari sekali pengangkutan sampah dilakukan oleh petugas kebersihan?

a) Jawab : Pengangkutan sampah di Padang Lawas utara kadang lama kadang sudah cepat,, pernah disini sampah dibiarkan sehari-sampai membusuk, tidak rutinnya pengangkutan sampah membuat timbunan sampah banak di depan rumah masyarakat dan dipinggir jalan.

Nama : Pita Hasibuan

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Usia : 27 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

a) Tanya : Adakah pengaruh yang dirasakan masyarakat dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh dinas kebersihan?

b) Jawab : pengaruh dari tindakan yang dilakukan dinas lingkungan hidup yaitu dengan adanya tong sampah yang disediakan di beberapa titik membuat beberapa titik sampah tidak bertumpuk parah, dulu sebelum

adanya tong sampah tersebut banyak warga yang membuang sampah sembarangan ke pinggir sungai, sebagian membakar, sebagian di tanam di belakang rumah, dan sekarang sampah sudah bisa dibuang ke TPS/TPA. Tapi hanya beberapa sampah yang diangkat ke TPS/TPA masih banyak warga yang membakar dan menanam atau dibuang sembarangan karena pengangkutan sampah yang tidak menentu dan ketersediaan sampah yang kurang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Puspa Jayantisiregar
Tempat/TglLahir :Portibijulu, 26 februari 1996
NPM : 1603100034
JenisKelamin :Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat :Padang Lawas Utara- PortibiJulu
Anakke :2

Nama Orang Tua

Ayah :Mula Warman Siregar
Ibu :MasniRokiah Harahap
Alamat : Padang Lawas Utara-PortibiJulu

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 101640 Portibi(2002-2008)
2. SMP Negeri 1 Portibi, (2008-2011)
3. SMA Yapim Biru-Biru (2011-2014)
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
Dengandemikianriwayathidupsayaperbuatdengansebenarnya.

Medan, Maret 2020

PUSPA JAYANTI SIREGAR



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Kap. M. H. Basri No. 33, Jp. 6624567 - Telp. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umhu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 306/KF/112-UMU/MSU-PPM/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Puspa Jayanti Siregar
NPM : 1603100034
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Negara

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 4 Rajab 1441 H
28 Februari 2020 M

Kepala UPT Perpustakaan,

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



1. *Ulati & Terpujahi*
Wab su ai hi spt dabrakan
tangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 1 Medan 20135 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6626274
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan *Administrasi Publik*
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, *17 - Desember* 2019.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : *Puspa Jayanti Siregar*
NPM : *1603100054*
Jurusan : *Administrasi Publik (kebijakan)*
Tabungan sks : *125* sks, IP Kumulatif *3,26*

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

1	<i>Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah di padang lawas utara</i>	<i>nk</i>
2	<i>Implementasi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2011 dalam rangka objek dan subjek pajak di padang lawas utara</i>	
3	<i>Implementasi peraturan daerah nomor 5 tahun 2012 dalam rangka sekutim kpra di padang lawas utara</i>	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan,
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan,
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal.*

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 2019

Ketua: *ah*

021

Pemohon,

Puspa Jayanti Siregar

Pembimbing: Mulyandika



Maui, Cerdas & Terpercaya
arsip-02 surat ini agar diketahui
dan langgeng

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20236 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 10.021/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 12 Desember 2019 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **PUSPA JAYANTI SIREGAR**
N P M : 1603100034
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81
TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN SAMPAH DI PADANG LAWAS UTARA**
Pembimbing : H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 12 Desember 2020.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 26 Rabiul Akhir 1441 H
23 Desember 2019 M

Dekan


DR. ARIFIN SAIEHI, S.Sos., M.SP.

Tembusan:

1. Kena P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringatan.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 1 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth. Medan,20....
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Puspa Jayanti Siragar
N P M : 1603100039
Jurusan : Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. /SK/IL3/UMSU-03/F/20.... tanggal dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012
Dalam Rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Padang
Lawas Utara

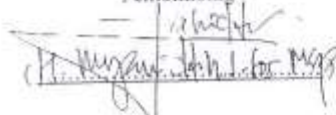
Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 5)

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam*

Menyetujui :

Pembimbing


H. Muzani, S.Pd., M.Pd., M.Pd., M.Pd.

Pemohon,


(Puspa Jayanti Siragar)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 009/KEP/II.3-ALU/UMSU-03/0/2020

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Hari, Tanggal : Jumat, 10 Januari 2020
 Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU
 Pemimpin Seminar : Naili Khairiah, S.P., M.Pd

No	Nama Mahasiswa (Pursell)	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
I	EPH ORTAFANDA	1603100140	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.S.P.	AMANDA MAHAROKA, S.Bus., M.SP.	IMPLEMENTASI PERDA KOTA MECAN NO.13 TAHUN 2011 DALAM RANGKA PENTEGIAN SISTEM INFRASTRUKTUR PERKOTAAN DI KOTA JEMBER
II	YURI AGUSTIANI	1603100061	SYAFIUDIN, S.Sos., M.HI.	Drs. R. KUBAWATI, M.A.P.	FUNGSI HOCORONASI BUKHICA DALAM PERENCANAAN WISATA JELUJUNG PENGADAPAN DI KABUPATEN ACEH-TENGGAH
III	CHEA GUSMITHA RIYANTI	1603100027	Drs. H. BANGUN HARTUPURULLI, M.Si.	Drs. R. KUSHADI, M.A.P.	PENGARUH PEMASWASWY MELEKAT TERHADAP KINERJA ARIBIS DI DALAM RELAYANAN ADMINISTRASI DI DINAS KOPERASISUMBER DAYA MUDA
IV	VITRA RIZKY BUTAR BUTAR	1603100093	Drs. H. BANGUN HARTUPURULLI, M.Si.	IDA MARTINELLY, SH, MM	PELAYANAN FUNGSI KEMUKHAWAN-GERAK SEKOLAH DALAM MENEGHATKAN KUALITAS SEKOLAH SD NEGERI 10800 DI DESA PEMATANG JOHNE, LABUHANDEI
10	RUBFA JAYANTI PREGANI	1603100034	IDA MARTINELLY, SH, MM.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.S.P.	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENYELENGGARAN PENGELOLAAN SAMPAH DI PADANG LAYANG UTARA

Medan, 12 Januari 2020 M

08 Januari 2020 M

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.S.P.



UIN
 "Jawab sialat di agi purnama"
 an tarogolnya

FAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muhtar - No. 2 Medan 20228 Telp. (061) 621-567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektorg@umsu.ac.id

Skiz

BERITA KEMARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Puspita Cipta Sari
 NPM : 1607100024
 Jurusan : Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 Dalam rangka pengendalian pengelolaan Sampah

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1)	25-12-2019	Bimbingan awal tentang materi.	
2)	28-12-2019	dan review proposal.	
3)	02-01-2020	Bimbingan lanjutan tentang.	
4)	03-01-2020	ACE Skripsi proposal.	
5)	13-01-2020	Review proposal pasca Revisi.	
6)	17-01-2020	Bimbingan penyempurnaan.	
7)	10-02-2020	Bimbingan penelitian hukum.	
8)	17-02-2020	Bimbingan menulis skripsi.	
9)	24-02-2020	Bimbingan menulis skripsi.	
10)	27/02/2020	ACE body skripsi.	

Medan, 21 Februari 2020

Dekan.

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke-1

 H. Nurwanda, S.Pd, M.Pd



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Sila bertanggung jawab diri agar dibenarkan
waktu dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 045/KET/IL3-AU/UMSU-03.F/2020 Medan, 26 Jumadil Awal 1441 H
Lampiran : -- 22 Januari 2020 M
Hal : **Mohon Diberikan Izin**
Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth : Kepala Dinas Kebersihan Padang Lawas Utara
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk mempesoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **PUSPA JAYANTI SIREGAR**
N P M : 1603100034
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) / Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81
TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN SAMPAH DI PADANG LAWAS UTARA**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
JALAN LINTAS GUNUNGTUA – LANGGA PAYUNG KM. 3,5
GUNUNGTUA KODE POS 22753

Nomor : 600 / *SH* / DLH / 2020
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**


Gunungtua, 30 Januari 2020
Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di-
Medan

Sehubungan dengan surat Bapak Nomor : 045/KET/IL3-A11A/UMSU-03/F/2020 tanggal 22 Januari 2020 perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa, dimana mahasiswa atas nama Puspa Jayanti Siregar NPM : 1603100034 bermaksud akan mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan Program Studi S-1 Ilmu Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dalam Rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Padang Lawas Utara".

Berknaan dengan hal tersebut, bersama ini Kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut dapat melakukan penelitian seperti yang dimaksud di atas, sepanjang tidak melanggar peraturan yang berlaku dan untuk data/keterangan yang diperlukan dapat langsung berkoordinasi ke dinas.

Demikian Kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA


MARA HAMID, SP, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 196607021989031007

